

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam alokasi Dana Gampong serta hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut di Gampong Meunasah Puuk, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Permasalahan utama yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah rendahnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan Dana Gampong, terutama pada tahap evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan. Masyarakat cenderung pasif, khususnya kelompok perempuan dan lansia, serta masih kuatnya anggapan bahwa pembangunan adalah semata-mata tanggung jawab pemerintah gampong. Padahal, dalam semangat otonomi desa dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan di tingkat desa.. Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff yang menekankan empat dimensi keterlibatan: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari perangkat gampong, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, serta masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Meunasah Puuk telah berpartisipasi aktif, khususnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, seperti dalam forum Musdus dan Musrenbang. Namun, partisipasi belum merata, terutama dari kelompok perempuan dan lansia yang kurang terlibat. Hambatan utama yang ditemukan antara lain kurangnya sosialisasi, rendahnya tingkat pendidikan partisipatif, serta persepsi bahwa pembangunan adalah tanggung jawab penuh pemerintah desa. Kesimpulannya, partisipasi masyarakat sudah mulai tumbuh namun belum inklusif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi berkelanjutan, peningkatan akses informasi, dan pembukaan ruang partisipatif yang lebih luas dan adil agar Dana Gampong benar-benar dapat dikelola berdasarkan prinsip partisipasi dan akuntabilitas publik.

Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat, Dana, Gampong, Pembangunan.

ABSTRAC

This study aims to analyze community participation in the allocation of Village Funds and the challenges encountered in the process in Meunasah Puuk Village, Idi Rayeuk Subdistrict, East Aceh Regency. The main issue underlying this research is the low level of community involvement in all stages of Village Fund management, especially in the evaluation and utilization of development outcomes. The community tends to be passive, particularly among women and the elderly, and there remains a strong perception that development is solely the responsibility of the village government. In fact, under the spirit of village autonomy and as mandated by Law No. 6 of 2014 on Villages, communities have both the right and obligation to actively participate in the planning, implementation, supervision, and evaluation of village development programs. The grand theory used in this research is Cohen and Uphoff's participation theory, which emphasizes four dimensions of involvement: planning, implementation, benefit utilization, and evaluation. This research employs a descriptive qualitative method, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. Informants included village officials, community leaders, women's groups, youth, and general residents. The findings show that the people of Meunasah Puuk have actively participated, particularly in the planning and implementation stages, through forums such as Musdus (hamlet meetings) and Musrenbang (village development planning meetings). However, participation remains uneven, especially among women and the elderly. The main obstacles identified include lack of socialization, low levels of participatory education, and the perception that development is entirely the responsibility of the village government. In conclusion, community participation has begun to grow but is not yet inclusive. Therefore, strengthening community capacity through continuous education, increasing access to information, and expanding inclusive participatory spaces is necessary so that Village Funds can be managed according to the principles of participation and public accountability.

Keywords: Participation, Community, Village Funds, Gampong, Development.